



# Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto

Asyhabuddin \*)

**Abstract:** Anti-discriminatory practitioners in many campuses have, so far, focused themselves too much on gender. In fact, there are more than one source of discrimination and oppression. One of them is ableism. Ableism is an ism that categorizes people by seeing their organs of body. For it, people can be divided into two groups. Those are the able and the disable. The able is a group of people who are "normal" in term of their organs of body. Conversely, the disable is a group of people who are "abnormal" in term of those. The categorization leads to discriminatory acts and views of "normal" people to the disable. One of Requirements of enrolling to schools or jobs is that the candidate should be physically and spiritually healthy. This condition makes many "disable" people eliminated from the competition. In order to combat the discrimination, one of the ideas is exchanging the term disable/disability with diffable/diffability. Another idea is inclusive education. That is an education system which put the diffable and the non-diffable in one class. This system is very effective for combatting discrimination and campaigning democracy and equality in life. **Keywords:** *Discrimination, ableism, diffability, inclusive education.*

## Mengapa Hanya Gender? Merambah Ranah Anti-diskriminasi Lain

Sensitivitas gender telah sekian lama menjadi tema hangat yang banyak dikemukakan dan didiskusikan di banyak artikel dalam berbagai jurnal ilmiah ataupun dalam berbagai makalah di seminar ilmiah. Pendidikan yang sensitif-gender pun telah sebegitu kuat merasuki akal pikiran kaum terpelajar di kampus-kampus sehingga pusat-pusat studi yang didedikasikan untuk mengurus-utamakan (*mainstreaming*) gender agar persoalan pembedaan dan diskriminasi berbasis jenis kelamin tersebut menjadi pusat perhatian para pengambil kebijakan telah banyak berdiri di kampus-kampus seperti Pusat Studi Gender (PSG) di STAIN Purwokerto atau Pusat Studi Wanita (PSW) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, misalnya.

Namun demikian, di tengah derasnya upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan yang didasarkan atas jenis kelamin (*sexism*), ada beragam diskriminasi lain yang didasarkan pada isme-isme lain yang tampaknya luput dari perhatian para cerdas-pandai di republik ini. Salah satu contohnya adalah diskriminasi yang didasarkan pada kemampuan fisik (*ableism*).

Paham *ableism* yang mengukur manusia dengan melihat kemampuan fisik telah menjadi sumber penindasan dan kezaliman yang tidak kalah bengisnya dengan *sexism*. Banyak sekali orang yang memiliki kemampuan berbeda secara fisik harus tersingkir dari dunia pendidikan maupun pekerjaan, meskipun pendidikan dan pekerjaan yang diinginkan oleh kelompok anak manusia tersebut sesungguhnya tidaklah mengandalkan kemampuan fisik.

Doktrin sehat jasmani dan rohani yang sering menjadi syarat utama bagi orang-orang yang ingin mendaftar sekolah atau melamar pekerjaan telah sekian lama menjadi momok yang mampu membuat impian seorang difabel dengan difabilitas<sup>1</sup>-nya buyar tanpa terelakkan. Bahkan seorang Gus Dur, yang diakui oleh banyak pakar sebagai orang yang sangat maju pola-pikirmya sekalipun, pada pemilihan



presiden tahun 2004 pernah terpental karena syarat sehat jasmani dan rohani yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi para calon Presiden Republik Indonesia.

Melihat fenomena tersebut, sesungguhnya persoalan difabilitas mestinya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari para aktivis dan akademisi yang “benar-benar” ingin menghapuskan diskriminasi oleh umat manusia atas saudara sesama manusia mereka, yang bersumber pada stereotipe-stereotipe salah yang didasarkan pada isme-isme yang diskriminatif.

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan beberapa hal mengenai difabilitas dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Bagian pertama akan mengulas mengapa istilah difabilitas harus dipilih daripada disabilitas. Selanjutnya, tulisan ini mengulas ide pendidikan inklusif sebagai pemecahan masalah bagi diskriminasi kaum difabel di dunia pendidikan. Terakhir, tulisan ini juga berupaya menganalisis kemungkinan diterapkannya pendidikan inklusif di STAIN Purwokerto.

### **Ableism Sebagai (Salah Satu) Sumber Diskriminasi**

Sebagaimana disebutkan di atas, *sexism* bukanlah merupakan satu-satunya sumber diskriminasi dan penindasan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain. Demikian pula, *ableism* juga hanyalah merupakan salah satu sumber diskriminasi dan penindasan.

Mullaly mencatat setidaknya ada enam macam paham (isme) yang menjadi sumber tindakan-tindakan diskriminatif manusia atas manusia lain.<sup>2</sup> Keenam isme tersebut adalah *sexism* yang menjadi sumber penindasan terhadap perempuan; *heterosexism* yang menjadi sumber opresi dan diskriminasi kelompok gay dan lesbian; *ableism* yang menjadi sumber diskriminasi terhadap kaum difabel; *ageism* yang menjadi sumber diskriminasi terhadap orang-orang tua; *racism* yang menjadi sumber diskriminasi terhadap orang-orang dengan warna kulit berbeda; dan *classism* yang menjadi sumber diskriminasi dan opresi atas dasar kelas sosial.<sup>3</sup> Untuk kebutuhan tulisan ini, maka hanya salah satu dari paham-paham penyebab munculnya tindakan-tindakan diskriminasi yang akan diulas lebih jauh. Satu paham tersebut adalah *ableism*.

Paham *ableism* adalah paham yang menyatakan bahwa manusia dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang *able* (mampu) dan kelompok *disable* (tidak mampu). Pengelompokan umat manusia ke dalam dua kelompok ini didasarkan pada pandangan mengenai normal dan abnormal. Manusia dipandang normal, dan oleh karena itu juga mampu atau memiliki kemampuan, jika dia memiliki anggota tubuh, seperti tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya, sebagaimana layaknya mayoritas umat manusia lain. Sementara itu, orang-orang yang memiliki anggota tubuh berbeda, misalnya memiliki tangan atau kaki hanya satu, maka mereka dipandang tidak normal atau abnormal dan oleh karena itu tidak mampu secara fisik.<sup>4</sup>

Paham ini, pada gilirannya memunculkan konsep-konsep, cara pandang, dan sikap-sikap yang memperlakukan umat manusia secara berbeda. Orang-orang yang disebut normal diberi hak-hak yang tidak diberikan secara sama kepada orang-orang yang dianggap abnormal. Dari sini kemudian konsep kesehatan jasmani dan rohani sebagai persyaratan orang yang mendaftar ke sebuah institusi, baik itu



pendidikan, perusahaan atau bahkan jabatan-jabatan publik seperti presiden, bupati, gubernur, dan sebagainya, diambil. Pada titik ini, paham *ableism* kemudian digunakan sebagai alat menghadang orang-orang yang dianggap abnormal untuk menjadi murid, mahasiswa, karyawan, ataupun menduduki jabatan publik seperti bupati, gubernur, presiden, dan sebagainya.

## Difabilitas dan (bukan) Disabilitas: Mengubah Cara Pandang

Ada beberapa istilah yang selama ini digunakan untuk menyebut “keberbedaan” baik secara fisik maupun mental yang dimiliki oleh seseorang. Cacat, tuna netra, tuna daksa, dan sebagainya, yang semuanya terangkum dalam kata disabilitas.

Disabilitas adalah istilah yang diderivasi dari kata *disability*, sebuah kata benda dalam bahasa Inggris yang merupakan bentukan dari kata sifat *disable* (tidak mampu) yang merupakan antonim dari *able* (mampu). Kata *disability* secara literal bermakna ketidakmampuan.

Dengan menggunakan istilah tersebut, maka ada suatu pandangan yang menyertainya, yaitu bahwa orang-orang yang memiliki kelainan fisik adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas apapun. Padahal fakta dalam kehidupan memberikan sederet bukti bahwa orang-orang dengan kondisi fisik yang berbeda mampu melakukan aktivitas-aktivitas keseharian. Sebut misalnya Stephen Hawking, seorang yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas kursi roda, ternyata mampu menemukan beberapa teori besar, contohnya adalah teori Big Bang.

Pada masa belakangan, penyebutan terhadap orang-orang yang berbeda secara fisik dengan kata *disabel* (*disable*/orang cacat) mulai mendapatkan gugatan dari para aktivis antidiskriminasi. Para penolak diskriminasi mempopularkan kata baru yang dirasa lebih mampu menggambarkan secara lebih positif dan utuh untuk kaum yang berbeda secara fisik. Kata yang digunakan oleh kelompok ini adalah *diffability* (difabilitas) yang merupakan akronim dari *different ability* (kemampuan yang berbeda). Sedangkan orang-orangnya disebut dengan kaum *diffable* (difabel) yang merupakan akronim dari *differently able* (memiliki kemampuan secara berbeda). Dengan menggunakan kata ini, maka gambaran yang lebih positif dan adil terhadap kaum *diffabel* bisa diberikan.

Kata *diffabel* menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sebagian anggota tubuh yang berbeda dengan orang lain bukanlah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkarya. Orang-orang ini diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda. Jika orang-orang yang memiliki tangan melukis dengan tangannya, maka orang-orang yang tidak memiliki tangan tetap mampu melukis tetapi dengan menggunakan kaki atau mulutnya.

Jadi, dengan demikian, perubahan penyebutan dari *disable/disability* menjadi *diffable/diffability* bukanlah hanya perubahan istilah belaka. Namun, ada makna sangat dalam yang terkandung di dalamnya, yaitu pengakuan akan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki bentuk tubuh berbeda dengan orang lain tersebut. Perubahan ini dilakukan untuk secara bertahap mengubah



stigma yang dibangun oleh masyarakat “normal”, bahwa kaum “cacat” tidak memiliki manfaat bagi kehidupan dan hanya menjadi beban bagi kaum “normal”.

### **Difabilitas dan Kebutuhan akan Pendidikan Inklusif**

Kaum difabel biasanya diberi pendidikan di sekolah khusus yang disebut sebagai sekolah luar biasa yang memang didirikan untuk menampung kelompok mereka. Sesungguhnya, tujuan pengelompokan kaum difabel di dalam lembaga pendidikan khusus semacam ini baik, karena model sekolah semacam ini akan memudahkan pengajar untuk merencanakan dan menyampaikan pengajaran. Namun, menurut hemat penulis, ada beberapa efek tidak menguntungkan yang juga menyertainya, di antaranya sebagai berikut.

#### **Pembelajaran akan berjalan secara lamban**

Dalam sebuah riset sederhana yang pernah penulis lakukan terhadap mahasiswa difabel di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, penulis menemukan bahwa sebagian besar responden merasa pendidikan dasar mereka di SLB dan SLTPLB berjalan sangat lamban sehingga mereka harus belajar ekstra keras untuk mampu mengejar ketertinggalan ketika mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kelambanan tersebut, pada gilirannya, tidak memiliki kekuatan apapun untuk memacu semangat belajar mereka atau sebaliknya, malahan membuat mereka frustrasi, terutama bagi yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi.

Menurut para mahasiswa difabel tersebut, seharusnya mereka dididik di sekolah-sekolah umum, di mana mereka akan belajar bersama dan bersaing secara sehat dengan para siswa non-difabel sejak awal pendidikan mereka.

#### **Belum ada pendidikan tinggi luar biasa**

Hingga saat tulisan ini dibuat, sepengetahuan penulis, belum satu pun lembaga pendidikan tinggi khusus kaum difabel dalam bentuk Perguruan Tinggi Luar Biasa (PTLB) yang telah berdiri di seluruh dunia. Jika kemudian dunia pendidikan bersikeras untuk terus mempertahankan model pendidikan yang memisahkan antara kaum difabel dan non-difabel, maka kaum difabel tidak akan ada yang mampu mengenyam pendidikan tinggi, dan konsekuensinya, tidak akan ada yang bisa menjadi sarjana, master, atau doktor.

Kedua alasan di atas menjadikan pendidikan inklusif menjadi model pendidikan yang diyakini oleh sebagian orang akan mampu dijadikan sebagai solusi yang paling tepat bagi kaum difabel. Model pendidikan ini dianggap sebagai model pendidikan yang mampu menjamin terwujudnya prinsip pendidikan untuk semua,<sup>5</sup> sebagai satu-satunya cara untuk memberantas ketidaksetaraan dan ketidakadilan,<sup>6</sup> sebagai strategi untuk mendorong proses demokratisasi,<sup>7</sup> dan sebagai alat untuk menghapus marjinalisasi atas sekelompok umat manusia.<sup>8</sup>

### **Sekilas tentang Pendidikan Inklusif**



Konsep pendidikan inklusif pertama kali dimunculkan secara formal di dalam The Jomtien World Conference on Education for All yang diadakan oleh Unesco pada tahun 1990. Namun, di dalam konferensi ini konsep pendidikan inklusif belumlah terumuskan secara baik. Konferensi ini hanya menegaskan pentingnya penghapusan diskriminasi dalam bidang pendidikan melalui jargon pendidikan untuk semua.<sup>9</sup> Konsep pendidikan inklusif mulai mewujud dalam sebuah kerangka kerja yang jelas pada saat Unesco menyelenggarakan The Salamanca World Conference on Special Needs Education pada tahun 1994.<sup>10</sup>

Pada paragraf ketiga dari The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education yang dihasilkan dari konferensi tersebut dinyatakan bahwa:

“... schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalised areas or groups.”<sup>11</sup>

Dari kerangka kerja tersebut tampak jelas bahwa pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang ditujukan untuk mampu mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi mereka. Sistem pendidikan ini tidak hanya sekadar untuk mengakomodasi kaum difabel, tetapi juga kelompok-kelompok anak lainnya, seperti anak jalanan, pekerja anak, anak-anak dari daerah terpencil dan sebagainya.

Jadi, konsep pendidikan inklusif dimunculkan untuk menjamin akses pendidikan bagi semua anak. Model pendidikan ini diyakini sebagai alat yang paling efektif untuk memerangi diskriminasi, menciptakan masyarakat yang bisa menerima perbedaan, dan menjamin berjalannya konsep pendidikan untuk semua sebagaimana yang dicita-citakan oleh Unesco sejak konferensi Jomtien sebagaimana telah disebut di atas. Pasal 2 The Salamanca Statement menyatakan, “Regular schools with inclusive orientation are the most effective means of combating discrimination, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all”.<sup>12</sup>

Pentingnya pendidikan untuk semua yang diwujudkan melalui pendidikan inklusif ini, kemudian semakin dipertegas oleh Unesco melalui the Dakar World Education Forum pada tahun 2000. Forum tersebut menghasilkan Dakar Framework for Action, yang salah satu paragrafnya menyatakan:

“The key challenge is to ensure that the broad vision of Education for All as an inclusive concept is reflected in national government and funding agency policies. Education for All ... must take account of the need of the poor and the most disadvantaged, including working children, remote rural dwellers and nomads, and ethnic and linguistic minorities, children, young people and adults affected by conflict, HIV/AIDS, hunger and poor health; and those with special learning needs...”<sup>13</sup>

Jadi, pendidikan inklusif bukan semata-mata pendidikan yang membaurkan antarorang yang berbeda-beda secara fisik, ekonomi, gender, dan sebagainya di dalam satu kelas bersama, tetapi lebih jauh lagi, ia menanamkan baik kepada para guru maupun kepada para murid nilai-nilai yang menghargai perbedaan antar manusia dan penerimaan terhadap fakta adanya keberagaman di



masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi diskriminasi yang didasarkan pada berbagai sumber sebagaimana di atas. Mengenai ini, Unesco menyatakan:

Inclusive education is concerned with providing appropriate responses to the broad spectrum of learning needs in formal and non-formal educational settings. Rather than being a marginal theme on how some learners can be integrated in the mainstream education, inclusive education is an approach that looks into how to transform education systems in order to respond to the diversity of learners. It aims to enable both teachers and learners to feel comfortable with diversity and to see it as a challenge and enrichment in the learning environment, rather than a problem.<sup>14</sup>

### **STAIN Purwokerto menjadi Lembaga Pendidikan Inklusif, Mungkinkah?**

Mungkinkah STAIN Purwokerto menjadi sebuah lembaga pendidikan inklusif? Jawabannya bisa: ya, bisa: tidak. Semua tergantung kepada kemauan bersama para pengelolanya: apakah mereka ingin *care* terhadap kaum difabel atau tidak.

Pendidikan inklusif membutuhkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, baik dari sisi infrastruktur maupun suprastruktur. Berikut beberapa syarat minimal, yang menurut penulis harus dipenuhi bila sebuah lembaga pendidikan akan dijadikan sebagai sebuah lembaga pendidikan inklusif.

#### **Membuat database mahasiswa difabel**

Database khusus mahasiswa difabel penting untuk dibuat agar memudahkan pemberian informasi kepada para dosen yang akan mengajar di kelas yang memiliki mahasiswa difabel. Pemberian informasi sebelum proses perkuliahan berjalan ini penting agar para dosen terkait menyediakan pola pengajaran yang tepat bagi para mahasiswa difabel.

Database ini juga penting untuk bahan pertimbangan bagi pihak Tata Usaha (TU) dalam mempersiapkan ruang perkuliahan. Kuliah-kuliah bagi kelas-kelas yang berisi mahasiswa difabel semestinya ditempatkan di ruang-ruang yang mudah diakses oleh para mahasiswa tersebut terkait difabilitas mereka.

#### **Membangun lingkungan akademik sensitif difabilitas**

Lingkungan akademik di sini meliputi gedung-gedung perkuliahan, perkantoran, dan perpustakaan; bahan-bahan pustaka yang diperlukan di dalam perkuliahan; dan proses perkuliahan.

Gedung-gedung yang dibangun untuk sebuah universitas inklusif terkait difabilitas mestinya aksesibel bagi para mahasiswa difabel. Jalan dari satu lantai ke lantai lain di atas atau di bawahnya mestinya memungkinkan bagi pengguna kursi roda untuk melaluinya.

Berkean dengan bahan pustaka, mahasiswa tuna netra memerlukan jenis bahan pustaka berbeda. Perpustakaan di sebuah universitas inklusif mestinya menyediakan koleksi-koleksi atau bahan-bahan pustaka yang menggunakan huruf braille atau “buku bicara” untuk menjamin bahwa para mahasiswa tuna netra juga membaca bahan yang sama dengan para mahasiswa non-difabel.

Proses perkuliahan mestinya sensitif difabilitas. Mahasiswa difabel, terutama tuna netra, membutuhkan pola pengajaran yang sedikit berbeda dengan mahasiswa non-difabel. Untuk menuju hal



ini, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu *pertama*, penyusunan kebijakan pola pengajaran yang sensitif difabilitas. Kebijakan semacam ini akan memberi rambu-rambu kepada para staf pengajar untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap para mahasiswa difabel yang mengikuti kuliah di kelas-kelas mereka.

*Kedua*, Pengembangan pengetahuan dosen mengenai strategi mengajar mahasiswa difabel. Untuk memenuhi kebutuhan ini, serangkaian *training* dan *workshop* perlu dilakukan. Inheren di dalam pengembangan pengetahuan dosen mengenai difabilitas ini adalah upaya untuk mengubah pola pandang para staf pengajar berkenaan dengan difabilitas. Teori sistem menyatakan bahwa manusia hidup sebagai sebuah organisme yang saling terkait dan saling mempengaruhi.<sup>15</sup> Merujuk pada teori itu, sistem sosial yang diskriminatif terhadap kaum difabel sedikit banyak pasti mempengaruhi bagaimana seseorang yang tumbuh di dalam sistem tersebut memandang kaum difabel. Dalam kalimat yang lebih spesifik, para staf pengajar yang hidup di sistem sosial yang diskriminatif terhadap kaum difabel, hampir dapat dipastikan memiliki pandangan yang diskriminatif pula terhadap kaum difabel. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan tugas mengajar sebuah kelas inklusif, seorang staf pengajar harus dibebaskan dari stereotipe yang mendiskriminasi mahasiswa yang akan diajarnya.

### **Menyediakan Tenaga pendamping mahasiswa difabel**

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas akademik, seperti pengisian KRS, ujian, dan sebagainya mahasiswa difabel membutuhkan pendamping untuk membaca dan menulis. Untuk kebutuhan ini, keberadaan tenaga pendamping untuk mahasiswa difabel mutlak dibutuhkan. Tenaga pendamping bisa diambilkan dari para petugas daftar ulang atau para pengawas ujian.

### **Membentuk dan mendukung lembaga layanan mahasiswa difabel**

Keberadaan lembaga yang memberikan layanan untuk mahasiswa difabel mutlak diperlukan. Seringkali diskriminasi dan opresi yang dialami oleh mahasiswa difabel secara berangsur-angsur terinternalisasi oleh mereka dan kemudian berdampak pada kondisi psikologis mereka. Dampak psikologis ini pada titik tertentu akan mengganggu mereka dalam menjalani perkuliahan. Lembaga mahasiswa difabel diperlukan untuk mengeliminasi dampak-dampak diskriminasi dan opresi yang mereka alami sehari-hari.

Contoh lembaga semacam ini ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di UIN tersebut telah berdiri Center for Disability Studies and Services yang memfokuskan diri pada studi dan pemberian layanan bagi mahasiswa difabel. Lembaga yang didirikan dan dijalankan, dengan dukungan fasilitas dan dana dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, oleh beberapa dosen UIN Sunan Kalijaga yang sebagian besar merupakan alumni School of Social Work, McGill University, Montreal, Kanada.<sup>16</sup>

Tentu saja ini membutuhkan *political will* dari para *petinggi* kampus. *Political will* ini akan muncul jika transformasi sikap bisa terjadi dengan baik. Perubahan cara pandang terhadap difabilitas dan kaum difabel merupakan syarat mutlak konsep pendidikan inklusif bisa dilaksanakan. Tanpa adanya kemauan



untuk menerima perbedaan dan keragaman di dalam kehidupan, maka pendidikan inklusif akan sulit untuk terwujud.

## Kesimpulan

Perjuangan untuk kesetaraan yang selama ini digelorakan di kampus-kampus melalui perjuangan gender mestinya tidak *mandeg* hanya di isu-isu sekitar gender belaka. Setelah sekian tahun berkuat dengan *gender mainstreaming*, sudah saatnya sekarang untuk beranjak ke level perjuangan untuk kesetaraan yang lebih luas, yakni perjuangan antidiskriminasi yang lebih general.

Dari Mullaly kita belajar bahwa diskriminasi dan operasi tidak hanya menimpa kaum perempuan saja. Akan tetapi, ada lima kelompok lain yang juga mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitarnya. Sudah saatnya gerakan perjuangan untuk kesetaraan yang berbasis di kampus-kampus memasuki ranah-ranah lain yang menjadi sumber terjadinya tindakan-tindakan opresif dan diskriminatif.

Peningkatan level gerakan tersebut bisa dimulai dengan, salah satunya, mengampanyekan dan mengaplikasikan konsep pendidikan inklusif di kampus-kampus. Untuk itu ada tiga level perubahan, yaitu *pertama*, perubahan sikap. Pendidikan inklusif mensyaratkan adanya perubahan sikap dari para guru dan murid-murid lain tentang adanya keragaman di dalam hidup. Maka dengan itu, para murid dan guru akan mampu untuk menerima bahwa ada sebagian teman mereka yang berbeda. *Kedua*, perubahan kurikulum. Kurikulum untuk kelas yang relatif homogen tentu saja tidak cocok untuk digunakan di kelas yang berisi orang-orang yang berbeda-beda. Kelas yang berisi campuran antara kaum difabel dan kaum non-difabel tentu membutuhkan kurikulum yang berbeda dengan kelas yang hanya berisi kaum non-difabel atau kaum difabel belaka. *Ketiga*, perubahan lingkungan. Kelompok difabel membutuhkan lingkungan yang aksesibel bagi mereka. Orang-orang yang berjalan dengan menggunakan kursi roda tentu membutuhkan ruang dan jalan yang berbeda dengan orang-orang yang berjalan dengan kaki.

Catatan penting yang harus diberikan untuk mengakhiri tulisan ini adalah bahwa konsep pendidikan inklusif dengan nilai-nilai luhurnya akan bisa terejawantahkan di dalam dataran praktis jika seluruh elemen masyarakat memiliki kemauan yang cukup kuat untuk menerima perbedaan dan hidup di dalam keragaman serta menghilangkan kebiasaan curiga dan memandang remeh orang lain. Ini PR pertama yang harus dilakukan. Karena sebagaimana dilansir oleh *Tempo Interaktif*, mengutip Mujito, Direktur Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional, banyak orangtua yang *enggan* memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusif karena menganggap sekolah yang memiliki murid difabel adalah sama dengan SLB.<sup>17</sup> PR masih banyak yang harus diselesaikan untuk menuntaskan masalah diskriminasi dan ketidaksetaraan di republik ini. PR ini menjadi tanggung jawab para akademisi dan kaum cerdas pandai negeri ini untuk menyelesaikannya.



## Endnote

<sup>1</sup> Difabel adalah pengindonesiaan dari kata *difable* yang merupakan kependekan dari *differently able* (mampu secara berbeda). Sementara difabilitas berasal dari kata *difability* yang merupakan singkatan dari *different ability* (Kemampuan berbeda). Kata ini untuk digunakan oleh para aktivis anti diskriminasi terhadap kaum “cacat” untuk menolak penggunaan kata *disable* (tidak memiliki kemampuan) atau *disability* (ketidakmampuan). Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai difabilitas dan disabilitas, lihat bagian selanjutnya dari artikel ini.

<sup>2</sup> Bob Mullaly, *Challenging Oppression: a Critical Social Work Approach* (Ontario: Oxford University Press, 2002), hal. 157-168.

<sup>3</sup> Selain empat macam isme yang disebutkan mullaly tersebut, ada beberapa paham lain yang bisa menjadi sumber diskriminasi. Contohnya agama dan nasionalisme. Meskipun agama mengajarkan cinta-kasih dan sikap saling membantu antar manusia, namun sejarah penuh dengan bukti yang membentangkan adanya sikap diskriminatif suatu kelompok penganut agama tertentu terhadap kelompok agama lain. Hal ini biasanya terjadi di suatu wilayah di mana ada satu agama yang dianut secara mayoritas. Demikian halnya dengan nasionalisme, *Tempo* edisi 17 Januari 2007, hal. 118, memberitakan berdirinya blok ITS (*Identity, Tradition, Sovereignty*), yaitu sebuah kelompok politik ultranasionalis yang beranggotakan 20 pemimpin partai dari tujuh Negara Uni Eropa yang dikenal anti terhadap para imigran non-Eropa.

<sup>4</sup> Mullaly, *Challenging Oppression*, hal. 167-168.

<sup>5</sup> Didi Tarsidi, “Pendidikan Inklusif sebagai Satu Inovasi Kependidikan untuk Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua” dalam <http://d-tarsidi.blogspot.com/2007/07/inovasiinklusi.html>

<sup>6</sup> Abdul Hameed, “Pendidikan Inklusif Satu-satunya Cara untuk Memberantas Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan” dalam [http://www.idp-europe.org/eenet/newsletter1\\_Indonesia/](http://www.idp-europe.org/eenet/newsletter1_Indonesia/)

<sup>7</sup> Fuad Fachruddin, “Pendidikan Inklusif: antara Cita dan Fakta”, dalam <http://mediaindonesia.com>.

<sup>8</sup> Unesco, “Unesco Concept Paper” dalam <http://portal.unesco.org/education>

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> “System Theory”, *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, <http://www.wikipedia.com>. Dari teori sistem ini, di dalam dunia *social work*, lahir konsep PIE (*person in environment*), yakni suatu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi di dalam diri manusia, cara pandang terhadap orang lain misalnya, secara tak terelakkan berkaitan dengan lingkungan atau sistem sosial di mana seseorang itu hidup. Lihat Kieran O'Donoghue, “Person(s) and Their Environment(s): the Paradigm of Social Work”, dalam <http://www.geocities.com/kieranodsw/Person.html>.

<sup>16</sup> Di lembaga ini, penulis pernah melakukan *field practice* saat penulis kuliah di Interdisciplinary Islamic Studies-Social Work. Pada saat itu, lembaga ini masih berupa embrio karena baru saja berdiri. Penulis, terkait dengan *field work* tersebut, terlibat di dalam beberapa penelitian awal yang akan dijadikan dasar oleh para pengelola lembaga tersebut untuk merumuskan program kerja. Beberapa penelitian yang penulis lakukan pada saat itu adalah penelitian kebutuhan mahasiswa difabel (*need assessment*) dan penelitian pola pengajaran bagi mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga. Lihat Asyhabuddin dan Zakiyah, *Menggagas Anti Diskriminasi di Lingkungan yang Diskriminatif*, laporan praktikum di Center for Disability Studies and Services (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2006). Lihat juga, Asyhabuddin dan Zakiyah, *Menuju Universitas Inklusif*, Policy Paper (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2006).

<sup>17</sup> *Tempo Interaktif*, “Pendidikan Inklusif Terhalang Penerimaan Orang Tua Murid”.

## Daftar Pustaka



- Anonim. 2007. "Ultranasionalis Kuasai Parlemen Eropa", dalam *Tempo* edisi 17 Januari 2007.
- Anonim. 2008. "Pendidikan Inklusif Terhalang Penerimaan Orang Tua Murid", dalam *www.tempointeraktif.com*, diakses pada 13 September 2008.
- Asyhabuddin dan Zakiyah. 2006. "Menggagas Anti-diskriminasi di Lingkungan yang Diskriminatif" dalam *Laporan Praktikum di Center for Disability Studies and Service*. Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga.
- . 2006. "Menuju Universitas Inklusif", dalam *Policy Paper*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Fachruddin, Fuad. 2008. "Pendidikan Inklusif: antara Cita dan Fakta". Diakses pada 13 September 2008.
- Hameed, Abdul. "Pendidikan Inklusif Satu-satunya Cara untuk Memberantas Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan" dalam [http://www.idp-europe.org/eenet/newsletter1\\_Indonesia](http://www.idp-europe.org/eenet/newsletter1_Indonesia). Diakses pada 15 September 2008.
- Mullay, Bob. 2002. *Challenging Oppression: a Critical Social Work Approach*. Ontario: Oxford University Press.
- O'Donoghue, Kieran. 2008. "Person(s) and Their Environment(s): the Paradigm of Social Work", dalam <http://www.geocities.com/kieranodsw/Person.html>. Diakses pada 3 Juli 2008.
- Tarsidi, Didi. 2008. "Pendidikan Inklusif sebagai Satu Inovasi Kependidikan untuk Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua" dalam <http://d-tarsidi.blogspot.com/2007/07/inovasiinklusi.html>. Diakses pada 15 September 2008.
- Unesco. 2008. "Concept Paper" dalam <http://portal.unesco.org/education>. Diakses pada 8 September 2008.
- Wikipedia. 2008. "System Theory", dalam <http://www.wikipedia.com>. Diakses pada 1 Juni 2008.